

**SISTEM UPAH ILI-ILI TERHADAP PENGALIRAN SAWAH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung  
Tengah)**

**SKIPSI**

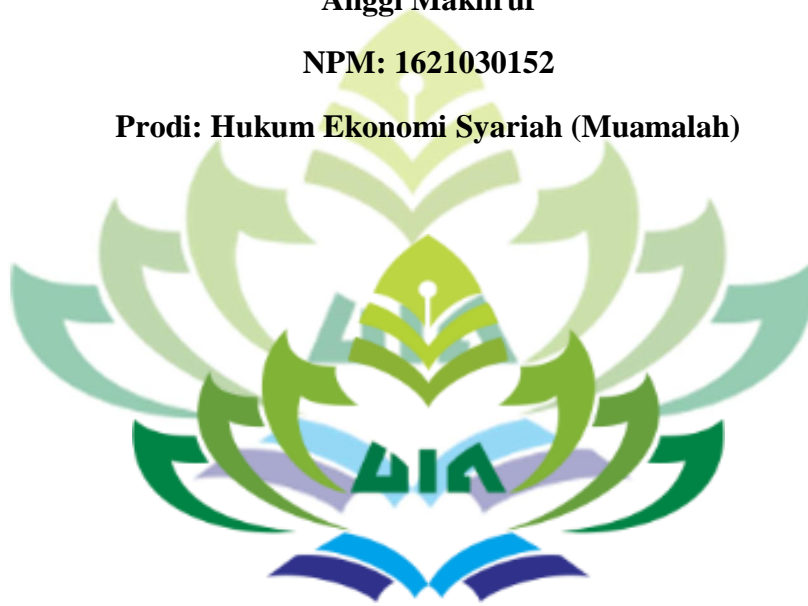
**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat–Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar S.H**

**Oleh:**

**Anggi Makhruf**

**NPM: 1621030152**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442H/2021**

## ABSTRAK

Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah upah mengupah (*ijarah*). Upah adalah pemindahan hak pemanfaatan jasa berupa imbalan yang diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu kerjasama dalam bidang pengairan untuk menunjang kebutuhan pertanian. Pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah 50kg padi/hektar. Pelaksanaan akad *ijarah* di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah terjadi secara lisan berdasarkan saling percaya diantara kedua belah pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik upah *ili-ili* dalam pengairan sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik upah *ili-ili* dalam Pengairan Sawah tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah *ili-ili* dalam pengairan sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik upah *ili-ili* dalam Pengairan Sawah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif *analisis*, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada para pengelola petugas *ili-ili* dan petani sebagai pengguna jasa *ili-ili*, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa pengelola petugas *ili-ili* dan beberapa pengguna jasa *ili-ili* yang menggunakan jasa pengairan sawah atau *ili-ili*. Analisis yaitu dengan analisis *kualitatif* dengan menggunakan metode cara berfikir *induktif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik upah *ili-ili* dalam pengairan sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu dilakukan dengan musyawarah dan akad yang dibuat atas kepercayaan dengan pembayaran upah atas jasa yang ditangguhkan setelah panen padi yaitu sebanyak 50kg padi/hektar dengan menjanjikan akan tercukupi dan terjaminnya ketersediaan air pada proses tanam. Petugas *ili-ili* menjelaskan hak dan kewajiban dengan tuntutan pembayaran penuh pada akhir panen. Namun dalam penerapan tidak sesuai dengan akad yang telah disebutkan karena banyaknya petani yang menginginkan pengairan sawah. Perspektif hukum Islam pada praktik upah *ili-ili* dalam pengairan sawah tersebut bahwa kerjasama dalam bidang pengairan merupakan bentuk *ijarah*. Namun yang dilakukan oleh petugas *ili-ili* dengan tidak memenuhi prestasi secara sempurna sesuai dengan yang telah diperjanjikan diakad dengan kenyataan yang ada namun dengan pembayaran upah atas jasa secara penuh, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini petani dapat memberikan upah sebagaimana jenis upah seperti upah yang bersifat sepadan atau *ajru mitsli* dengan mempertimbangkan kerja petugas *ili-ili* serta sepadan dengan kondisi kerjanya, apabila akad *ijarah* telah menyebutkan jasa kerjanya.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Makhruf  
NPM : 1621030152  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Maret 2021



menyatakan

Anggi Makhruf  
NPM.1621030152





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260**

**PERSETUJUAN**

**Judul** : “Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”

**Nama** : Anggi Makhruf  
**NPM** : 1621030152  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP.195512251985031002**

  
**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

  
**Khoirudin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Sistem Upah Ili-ili terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)"**. Oleh Anggi Makhruf NPM1621030152 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at 15 maret 2021

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

(.....)

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I M.E.I**

(.....)

**Penguji I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H.**

(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.**

(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy**

(.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
NIP. 196210221993031002

### MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

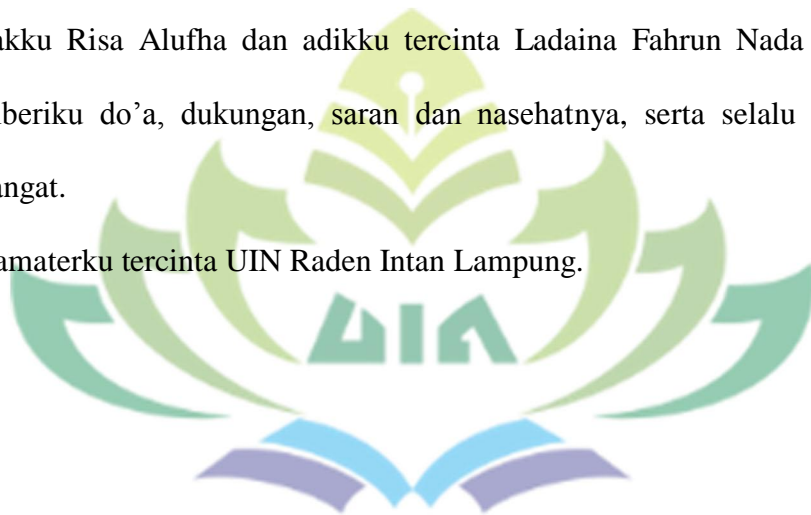
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanlah kepada mu apa yang telah kamu kerjakan.  
(QS. At-Taubah (9) :105)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang kucinta dan kusayang serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suwito dan Ibu Siti Asiyah yang kucintai yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta inspirasi kepadaku dan selalu berkerja untuk memenuhi segala kebutuhanku.
2. Kakakku Risa Alufha dan adikku tercinta Ladaina Fahrur Nada yang telah memberiku do'a, dukungan, saran dan nasehatnya, serta selalu memberiku semangat.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis mempunyai nama lengkap Anggi Makhruf, lahir di Kota Gajah pada tanggal 23 April 1998 Anak kedua dari tiga bersaudara. Merupakan buah cinta dari pasangan bapak Suwito dan ibu Siti Asiyah.

Pendidikan dimulai dari, SDN 2 Saptomulyo 2004-2010, SMP N 1 Punggur 2010-2013, MAN 1 METRO 2013-2016, Melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program (S1).

Kota gajah, 2021  
Yang Membuat,

Anggi Makhruf





## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang hasil Permainan Pasar Malam” tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Muamalah Fakultas Syariah UIN RadenIntan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak lepas dari dari khilafan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.SI dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.SI Selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Prof. H. Faisal, S.H., M.H MSelaku pembimbing I dan Ibu Hekma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
  6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenakannya penelitian meminjam literature yang dibutuhkan.
  7. Yang selalu sabar dan selalu menemani selalu menemani selama perjalanan kuliah ini Dara Finalisa
  8. Teman-teman seperjuangan Muamalah kelas A dan khususnya kepada teman-teman HIMAPOYA dan HAHAAHIHI yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
- Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung,  
Penulis

2021

Anggi Makhruf  
NPM.1621030152

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	
B. Alasan Memilih Judul .....	
C. Latar Belakang Masalah .....	
D. Fokus Penelitian .....	
E. Rumusan Masalah .....	
F. Tujuan Penelitian.....	
G. Signifikansi Penelitian .....	
H. Metode Penelitian.....	

### BAB II : KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori .....	
1. Akad Dalam Islam.....	
a. Pengertian Akad .....	
b. Dasar Hukum Akad .....	
c. Rukun Dan Syarat Akad .....	
d. Macam-Macam Akad .....	
e. Asas Berakad Dalam Islam .....	
f. Berakhirnya Akad .....	
2. <i>Upah Mengupah</i> Dalam Islam .....	
a. Pengertian <i>Upah (Ijarah)</i> .....	
b. Dasar Hukum <i>Upah (Ijarah)</i> .....	
c. Rukun Dan Syarat <i>Upah (Ijarah)</i> .....	
d. Macam-Macam <i>Upah (Ijarah)</i> .....	
e. Objek <i>Upah Mengupah (Ijarah)</i> .....	
f. Hal Wajib Yang Dilakukan <i>Mu'jir Dan Musta'jir</i> .....	
g. Berakhirnya <i>Upah Mengupah (Ijarah)</i> .....	
B. Tinjauan Pustaka .....	



### **BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Selatan .....
- B. Praktik Upah *Ili-Ili* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Selatan .....

### **BAB IV : ANALISA DATA**

- A. Analisis Praktik Upah *Ili-Ili* dalam Pengairan Sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah .....
- B. Perspektif Hukum Islam pada Praktik Upah *Ili-Ili* dalam Pengairan Sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.....

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....
- B. Rekomendasi.....

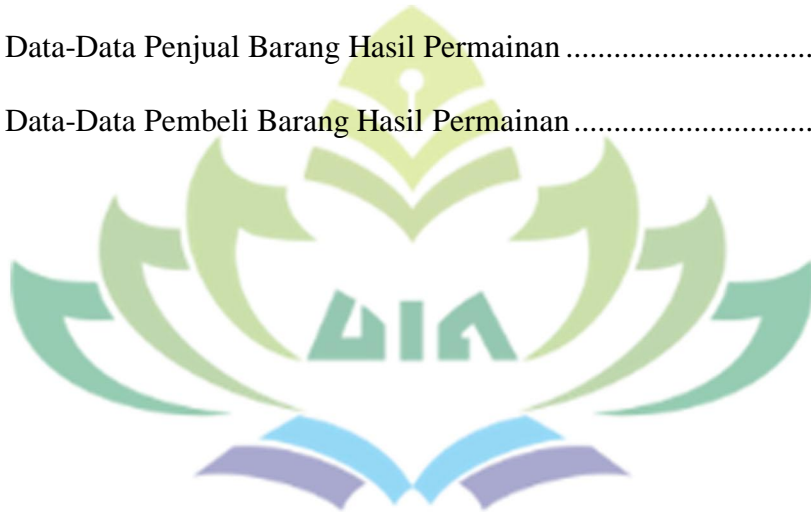
### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 3.1 Nama-Nama Demang/Lurah/Kepala Kampung .....	97
Tabel 2 Jumlah Penduduk .....	98
Tabel 3 Tingkat Pendidikan .....	99
Tabel 4 Jumlah penduduk Berdasarkan Agama.....	100
Tabel 5 Sarana Tempat Ibadah.....	100
Tabel 6 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Purawiwitan.....	102
Tabel 7 Jenis Barang yang diperjual belikan .....	109
Tabel 8 Data-Data Penjual Barang Hasil Permainan .....	115
Tabel 9 Data-Data Pembeli Barang Hasil Permainan .....	115



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Survey

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 : Blangko Konsultasi

Lampiran 5 : Hasil Turnitin





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Salah satu cara mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”**, adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>1</sup> Selain itu upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>2</sup>

*Ili-ili* adalah seseorang yang dipilih oleh kelompok petani di Desa Saptomulyo, yang bertugas membantu mengatur aliran irigasi yang menuju sawah. Dan *ili-ili* diberikan kepercayaan penuh oleh para petani, karena baik atau buruknya hasil panen sangat bergantung terhadap terpenuhinya aliran tersebut.

---

<sup>1</sup>Arti Kata “Sistem” (*On-line*) Tersedia di: <http://kbbi.web.id/sistem.html> (28 Januari 2020) Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah.

<sup>2</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Permatanet, 2016), h.141.

Pengaliran sawah adalah suatu tempat yang dipakai untuk mengaliri air yang biasanya dari waduk atau bendungan guna kepentingan mengaliri sawah.<sup>3</sup>

Perspektif hukum Islam, Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan setelah menyelidiki suatu permasalahan.<sup>4</sup> Sedangkan hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah syariat yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.<sup>5</sup> Sedangkan Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqih* menyebutkan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>6</sup> Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah seperangkat aturan yang bersumber langsung melalui wahyu Allah SWT dan sunah Rasul yang mengatur segala tingkah laku manusia khususnya dalam hal upah-mengupah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul ini adalah suatu bentuk pemberian upah atas suatu jasa atau pekerjaan *ili-ili* terhadap pengaliran air pada sawah yang dilakukan oleh beberapa pihak

---

<sup>3</sup> Arti kata "Pengaliran Sawah" (*on-line*) tersedia di <http://jagokata.com/arti-kata/irigasi.html> (28 Januari 2020) Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 475

<sup>5</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001), h. 21.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

di Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yang akan ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan penulis memilih judul skripsi **“Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”** yaitu sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Melihat munculnya masalah sistem upah yang dilakukan oleh petugas yang mengatur irigasi (*ili-ili*) ini, maka banyak para petani yang merasa dirugikan dalam hal ini pembayaran upah tersebut tanpa melihat kondisi panen saat musim itu padahal petugas yang mengatur irigasi ini telah memberikan jaminan akan tercukupinya air untuk petani yang telah membayar upah untuknya, namun pada sistemnya masih terdapat beberapa petani yang kekurangan pendistribusian dari air irigasi ini sehingga memicu berkurangnya hasil panen bahkan gagal panen. Maka dalam pembayaran ini menimbulkan masalah karena belum tercapainya keadilan untuk para petani, sehingga penelitian ini dianggap perlu dengan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini merupakan salah satu masalah yang termasuk didalam bidang ilmu yang penulis pelajari



yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- b. Selain itu penelitian ini belum pernah di bahas dalam bentuk skripsi, khususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mua'malah*).

### C. Latar Belakang Masalah

Umumnya keberhasilan pertanian sektor pangan ditentukan oleh adanya pengaturan pengairan yang baik. Pada kegiatan peningkatan produksi sawah khususnya tanaman padi. Tujuannya pengaturan pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan hasil produksi yang semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan produksi tersebut maka perlu halnya melakukan rehabilitas pengairan dan perluasan pengairan sawah. Petani yang menggunakan irigasi pengairan, dituntut untuk melakukan kerjasama dalam mengelola pengairan agar dapat teralokasi kesemua wilayah. Jadi untuk melakukan peningkatan irigasi pengairan di persawahan diperlukan kerjasama anatar semua pihak yang terkait agar tercapainya tujuan tersebut.

Kerjasama tersebut salah satunya adalah bentuk perjajian kerja bersama antara manusia sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa tega manusia.<sup>7</sup> Dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi

---

<sup>7</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.215

pemeluknya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ (رواه البخاري)

“Dari al-Miqdam Radhiallahu‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *Tidaklah seorang (hamba) memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya (sendiri), dan sungguh Nabi Dawud ‘alaihihissalam makan dari hasil usaha tangannya (sendiri)*” (HR. Bukhori)<sup>8</sup>

Pada hadis di atas telah dijelaskan bahwa kita diharuskan memakan yang kita makan itu kita dapatkan dengan cara yang baik dan benar. Sehingga akan menjadi makanan yang baik untuk tubuh kita. Salah satu kegiatan transaksi dalam Islam adalah sewa-menyewa yang disebut *ijarah*. *Ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut dengan upah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah mengupah.<sup>9</sup>

Obyek *ijarah* harus di ketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat

<sup>8</sup> Widjaya, *Terjemah Hadist Sahih Bukhari, Terjemahan Zainuddin Hamidy Hadist No 1966* (Jakarta: Bumirestu, 1951), h. 275.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 115

*isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberi upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).

Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia menyelesaikan dengan baik. Adapun upah untuk orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggung jawab penyewa (pemberi upah), dan ini adalah kewajiban yang harus ia tunaikan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya manusia bekerja karena ada motifasi dalam diri seseorang. Motivasi tersebut mendorong manusia untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu upah biasa dijadikan sebagai tolak ukur prestasi kerja. Karena upah merupakan suatu dorongan untuk meningkatkan kinerja bagi seseorang.

Sistem pengupahan pada irigasi ini adalah sesuai luas lahan pertanian yang dialiri air, setiap bidang tanah mempunyai perbedaan pembayaran. Sistem pembayaran upah kepada *ili-il* ini dilakukan oleh para petani setelah berakhirnya masa panen dengan seberapa luas bidang tanah yang mereka miliki. Setaip akhir panen para petani diwajibkan segera membayar upah tersebut kepada *ili-ili* sebesar 50 kilogram padi per hektarnya. Pada saat musim tanam *ili-ili* tersebut memberikan jaminan jika air akan terpenuhi hingga musim panen tiba, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang merasa kekurangan pengaliran air tersebut. Permasalahan dalam masyarakat ada sebagian petani yang merasa belum

---

<sup>10</sup>*Ibid.*



terpenuhinya hak dia untuk mendapatkan aliran air yang cukup, sehingga petani masih sering banyak mengalami kerugian.

Sistem pengupahan yang dilakukan oleh petani terhadap petugas irigasi ini telah memenuhi kesepakatan, namun pekerjaan yang dilakukan oleh petugas ini kurang baik. Karena masih banyak petani yang merasa kekurangan pasokan air yang cukup untuk mengalir persawahan mereka. Perjanjian diawal untuk musim tanam padi petugas irigasi menjamin akan tercukupinya pasokan air yang masuk ke sawah para petani, namun hal tersebut masih jauh dari kata cukup. Meskipun perjanjian ini hanya dilakukan melalui lisan, para petani telah memberikan kepercayaan penuh terhadap petugas irigasi dengan cara memberikan upah yang sesuai dengan kesepakatan pada awal masa tanam padi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka sangat penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai pemberian jaminan pengaliran air kepada petani dengan tinjauan hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka akan dikaji dalam judul “Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum Islam khususnya fiqih muamalah yang terkait dengan pelaksanaan sistem upah mengupah dalam pengairan sawah. Karena

penelitian difokuskan pada sistem upah mengpah dalam pengairan sawah dengan memberi jaminan yang dilakukan oleh *ili-ili* kepada para petani di Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Sistem Upah *Ili-ili* dalam Pengairan Sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang sistem Upah *Ili-ili* dalam Pengairan Sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Upah *Ili-ili* dalam Pengairan Sawah di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang Sistem Upah *Ili-ili* dalam Pengairan Sawah di Desan Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah pemberian jamainan dari petugas irigasi

terhadap petani dengan sistem pembayaran upah *ili-ili* dalam pengairan sawah, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

2. Secara praktis, Penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat baik yang melakukan petugas irigasi yang memberi jaminan dengan petani, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti akad sistem upah mengupah yang terjadi di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan , mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, maksudnya bagaimana akad awal untuk mengupah

---

<sup>11</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet Ke-21 (Bandung: Alfabeta 2015), h.6

<sup>12</sup> Moh. Pabuda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.10

*ili-ili* yang terjadi di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data primer yang didapat pada penelitian ini adalah wawancara dengan *ili-ili* dan petani Desa Saptomulyo.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu guna untuk menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>13</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi atau berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

### 4. Populasi dan Sempel

#### a. Populasi

Populasi adalah rujukan pada sekelompok orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian.<sup>14</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini

---

<sup>13</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 218.

<sup>14</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2008), h. 161.

adalah 12 orang pada Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yang terbagi dalam 2 petugas irigasi *ili-ili* pada pengairan sawah dan 10 petani yang menggunakan jasa *ili-ili* pada pengairan sawah di Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sempel

“Sampel menurut Suharsimi Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.”<sup>15</sup> Jadi dikarenakan populasi yang diambil dalam penelitian ini kurang dari 100 maka penelitian ini menggunakan penelitian populasi yaitu sebanyak 12 orang, dari 2 irigasi *ili-ili* pada pengairan sawah dan 10 petani yang menggunakan jasa *ili-ili* pada pengairan sawah di Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan guna untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan ditempat yakni di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 109.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.74



Untuk mencari data yang berkaitan dengan sistem upah mengupah antara petani dan jasa pengairan.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> *Interview* dilakukan dengan pihak petani dan jasa pengairan serta warga sekitar terkait sistem upah mengupah dalam pengairan sawah dengan pemberian jaminan untuk tercukupinya air di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>18</sup> Metode ini digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian mengenai sistem upah mengupah antara petani dengan jasa pengairan di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 186.

<sup>18</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 69.

## 6. Teknik Pengolahan Data

### a. *Editing*

*Editing* adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.<sup>19</sup>

### b. Sistematika Data

Sistematika Data adalah data yang disusun berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Sistem Upah *Ili-ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam di Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem upah mengupah pengairan sawah di Desa Saptomulyo. Tujuan dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai cara upah mengupah dalam pengairan sawah dengan memberikan jaminan kepada petani di Desa Saptomulyo dalam pandangan hukum Islam.

Metode berfikir ilmiah dalam penulisan ini adalah menggunakan cara deduktif yaitu metode analisa dengan cara bermula dari data bersifat

---

<sup>19</sup>*Ibid.* h. 75.

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 152.

umum, kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.<sup>21</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan sistem upah bagi upah mengupah dalam pengairan sawah dengan memberikan jaminan kepada petani di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah menurut perspektif hukum Islam.



---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h,85

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Dalam Islam

###### a. Pengertian Akad (العَقْدُ)

Menurut bahasa “akad” (العقد) jamaknya *al-‘uqud* (العُقُود) mempunyai dua pengertian, yakni secara hissi dan ini merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan (الشَّدُّ), mengikat (الربط). Kebalikannya adalah berarti melepaskan (الحَلُّ). Dan secara maknawi, dan ini merupakan makna kiasan yang dipinjam dari makna asli, yang berarti mengkokohkan (الثَّوْتِيقُ), menguatkan (الْيُؤَكِّدُ), menjamin (الضَّمَانُ), dan berjanji (العَهْدُ).<sup>22</sup>

Istilah akad dalam hukum Indonesia adalah perjanjian yang terdapat beberapa definisi dari akad itu sendiri:

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, *akad* merupakan pertemuan yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum padan objek akad.
- 2) Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1-2.

<sup>23</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 68.

Adapun makna akad secara syar'i yaitu "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung." Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dua keinginan itu dinamakan ijab dan kabul.<sup>24</sup>

Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diakadkan dari kondisi pertama kepada kondisi baru. Dibatasinya makna ikatan harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>25</sup>

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa akad itu sendiri adalah suatu ikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian atau suatu kegiatan yang mana akad tersebut akan mengikat kedua belah pihak sampai batas waktu yang ditentukan dalam akad.

## **b. Dasar Hukum Akad**

Firman Allah SWT berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya

---

<sup>24</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 17.

<sup>25</sup>*Ibid.*,



Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”( Q.S Al-Maidah (5): 1).

Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya.” (Q.S Al-Isra’(17): 34)

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:<sup>26</sup>

- a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*),
- b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*),
- c) Objek akad (*mahallul-‘aqd*),
- d) Tujuan akad (*maudhu’ al-‘aqd*).

#### 2) Syarat Akad

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 20

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>27</sup>

a) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in 'iqad*) antara lain:

- (1) *Tamyiz*,
- (2) Berbilang pihak (*at-ta 'adud*),
- (3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan)
- (4) Kesatuan majelis akad,
- (5) Objek akad dapat diserahkan,
- (6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- (7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
- (8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>28</sup>

b) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad memerlukan unsur-unsur penyempurn yang menjadikan suatu akad sah, unsur sahnya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- (1) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.

---

<sup>27</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 97-104.

<sup>28</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 95-98.

(2) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

c) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

(1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.

(2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

d) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memnuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

**d. Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut syara', maka akad terbagi dua, yaitu:

1) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:

a) *Akad Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad yang sahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

(1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

(2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.<sup>29</sup>

b) *Akad* yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sahih ini menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 106-108.

- (1) Akad yang *batil*, suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'.
- (2) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.<sup>30</sup>

2) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:

a) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu Musamanah*



Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.<sup>31</sup>

3) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:

a) Akad *Tijarah*

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 59.



Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

b) Akad *Tabarru'* (*Gratutions Contract*)

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi nirbala). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia.

Seperti *qard, wad'ah, rahn, kafalah*, dan lain sebagainya.<sup>32</sup>

4) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat bendanya akad terbagi menjadi:

a) Akad '*Ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan cara menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, rahn* dan lain sebagainya.

b) Akad *Ghairu 'Ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya *sighat* akad. Menimbulkan akad

---

<sup>32</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 60-61.

tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *ainiyah*, seperti akad amanah.<sup>33</sup>

#### 5) Berdasarkan Unsur Tempo Dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:

##### a) Akad *Al-Zamani* (akad bertempo)

Akad *al-zamani* yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini yaitu seperti akad upah-mengupah, sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam-meninjam. Akad tersebut memerlukan sebuah perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

##### b) Akad *Al-Fairui* (akad tidak bertempo)



Akad *al-fairui* yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.<sup>34</sup>

#### e. Asas Berakad Dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir,

<sup>33</sup>*Ibid.*, h. 62.

<sup>34</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 91-92.

bertindak, dan sebagainya.<sup>35</sup> Dimana asas berakad dalam Islam antara lain:

1) Asas Ilahiah

Asas ilahiah, menurut Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi kepada dua bagian, yaitu *Tauhid Uluhiyah* dan *Tauhid Rububiyah*. *Tauhid uluhiyah* yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan langit adalah milik-Nya, sedangkan *Tauhid rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.<sup>36</sup>

2) Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas kebebasan merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad) pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 238.

Landasan asas ini yakni Q.S Al-Baqarah (2): 265; Al-Maidah (5): 1; Al- Hijr (15): 2; Ar-Run (30): 95; An-Nisa' (4): 33 dan 72.<sup>37</sup>

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ آتِبَعَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ  
بِرِّيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْهُ أَكْثَرُ أُكْثَرِهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.” (Q.S Al-Baqarah (2): 265)

### 3) Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Seperti Firman Allah SWT berikut ini:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki” (Q.S An-Nahl (16): 71)

Hal ini menunjukkan, bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurnagan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.<sup>38</sup> Oleh karena

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 240.

itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan hak dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut.

#### 4) Asas Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Dalam Firman Allah Q.S Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (Q.S Al-Hadid (57): 25)

Adil adalah salah satu sifat Allah SWT. Yang seringkali disebutkan dalam Al-Qur’an, bersikap adil sering kali Allah SWT tekankan pada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil lebih menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.<sup>39</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah (5): 8)

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,h. 241.



Sikap adil harus selalu tercermin dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Hal ini disebutkan juga dengan kezaliman.

Penangguhan pembayaran utang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan yang zalim pula, karena ia telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.<sup>40</sup>

#### 5) Asas Kerelaan (*Ar-Ridha*)

Dalam Firman Allah Q.S An-Nisa' (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil (*al-aqdu bil bathil*). Berikut isi dari Firman Allah tentang asas kerelaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’(4): 29)

<sup>40</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, (Rabbani Press, 1997), h. 396.

Ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukaarela ini menunjukkan keikhlasan dan ikhtikad para pihak.<sup>41</sup>

#### 6) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidiqi*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perkatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika ketidakjujuran ini tidak diterapkan dalam peikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Firman Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar” (Q.S Al-Ahzab (33): 70)

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

#### 7) Asas Tertulis (*Al- Kitabah*)

---

<sup>41</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005), h. 240.

Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:<sup>43</sup> sukarela (*ikhtiyari*), amanah, kehati-hatian (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, *taisir*/kemudahan, iktikad baik, sebab yang halal.

#### **f. Berakhirnya Akad**

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

##### **1) Sebab *ikhtiyariyah***

Sebab *ikhtiyariyah* tersebut adalah *fasakh*, *iqalah* dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

##### **2) Sebab *Daruriyah***

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 98.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 98-99.

Sebab *daruriyah* tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- b) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- c) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.<sup>44</sup>

## 2. Upah Mengupah Dalam Islam

### a. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Dalam ekonomi Islam, sebuah jasa dikaitkan dengan *ijarah* (upah mengupaah). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan *ijarah* atau upah mengupah, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.<sup>45</sup> Lafal *ijarah* menurut bahasa (*etimologi*) berarti *Al- 'iwadl* yang artinya ganti dan upah (imbalan).

---

<sup>44</sup>Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 26-28.

<sup>45</sup>Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 231.

Upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>46</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan dalam produksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>47</sup> Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 78 Tahun 2015 Pasal 1 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja atau kesepakatan.<sup>48</sup>

Adapun dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut sesuatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan

---

<sup>46</sup> Al-Faruz Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989), h. 361

<sup>47</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet- 3, (Jakarta, Balai Pustaka 1994), h. 1108

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1, h. 2

keluarganya atau pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.<sup>49</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah memberikan sesuatu imbalan kepada pekerja atau buruh yang telah melakukan pekerjaan.

Menurut istilah *ijarah* mengandung beberapa pengertian (pendapat):

- 1) Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah *akad* untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 2) Menurut Syaikh Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah *akad* atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- 3) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah *akad* yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.<sup>50</sup>
- 4) Menurut pendapat Ulama Maliki dan Hambali, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>51</sup>
- 5) Menurut fatwa DSN-MUI, sewa-menyewa adalah *akad* pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, h. 2

<sup>50</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), h. 134.

<sup>51</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 112.

melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>52</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka *Al-Ijarah* adalah suatu transaksi atas barang atau jasa yang dilakukan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dengan jangka waktu tertentu dan melalui pembayaran upah atas pemanfaatan barang atau jasa tanpa pemindahan hak barang atau jasa tersebut.

Pengertian upah (*Ijarah*) menurut Islam yaitu *ijarah* menurut bahasa merupakan devasi dari kata *al-ajr* yang berarti upah.<sup>53</sup> Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti “*iwad*” (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>54</sup> *Ijarah* ialah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan sebuah pekerjaan sebagai balasan pekerjaannya.<sup>55</sup> Jadi *ijarah* menurut bahasa dan secara syara’ memiliki makna jual beli manfaat.<sup>56</sup>

Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah SWT menghalalkan upah karena merupakan kompensasi atas jasa-jasa yang telah diberikan seorang

---

<sup>52</sup>Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembayaran *ijarah*.

<sup>53</sup> Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, (Bandung: Media Fitrah Rabbani dan YPM Darussalam Kutai, 2010), h. 155

<sup>54</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 7

<sup>55</sup> Rachmad, Syafii, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

<sup>56</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin, Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Sistemnya Di Pasar Modal Indonesia, *Al-Adalah*, Vol XII, No. 4, 2015.



pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan ancaman siksa dari Allah SWT.<sup>57</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No:09/DSNMUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *Ijarah*, bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>58</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian *ijarah* merupakan akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *muajir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* tidak juga berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditujukan pada manfaat.

Demikian juga dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai obyek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali

---

<sup>57</sup> M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-Adalah* Vol. 14, No. 2, 2017.

<sup>58</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014). h. 91.

dalam seminggu. Dalam akad *ijârah* pekerjaan pada umumnya akan ditawarkan kepada orang tertentu dengan kontrak yang jelas antara dua orang atau lebih.<sup>59</sup> Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.<sup>60</sup>

#### b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Hukum asal upah-mengupah ialah *mubah* (boleh). Pemberian upah hukumnya *mubah*, tetapi bila hal itu sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib.<sup>61</sup> Dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW dan Ijma' tentunya banyak sekali yang membahas tentang aturan dalam melakukan transaksi upah mengupah yang mana beberapa darinya dijelaskan dibawah ini:

##### 1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanlah kepada mu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9) :105)

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggung jawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah

<sup>59</sup> Adur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju'âlah Dalam Multi Level Marketing (Mlm), *Al-Adalah* Vol. XIII, 2016.

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 115.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 184.

SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang meneruskan kebathilan, kezaliman, kesesatan dan penyimpangannya terhadap perintah-perintahnya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin.<sup>62</sup>

Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُكُمْ أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2): 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberi upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>63</sup>

Firman Allah SWT yang berbunyi:

<sup>62</sup> Syaikh Abdurrahman Bin Nashir, *Tafsir Al-Quran*, (Jakarta: Darus Haq, 2016), h. 333

<sup>63</sup> Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, Cet II. (Surabaya: Elba Fitrah Mndiri Sejahtera, 2015), h. 169-170.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقِهِنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ  
كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْزُوعٌ لَهُ  
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq (65) : 6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kalau perempuan yang sudah dicerai untuk menyusukan anaknya, berilah mereka upah atas kerjanya menyusukan itu dengan upah yang baik. Dan hal ini dirundingkan atau dimusyawarahkan dengan perempuan itu cara bagaimana penyelenggaraan penyusuan anak itu.

Tetapi jika kamu berada dalam kesukaran, dia disusukan oleh perempuan lain berarti jika tidak terdapat perdamaian diantaramu, umpamanya pihak laki-laki merasa keberatan anaknya disusukan oleh ibu anak itu karena ibunya menderita penyakit menular, atau meminta upah yang tinggi atau ibu anak itu tidak suka menyusukan anaknya, maka anak itu boleh disusukan oleh perempuan lain, sedangkan biayanya ditanggung oleh pihak laki-laki menyusukan anak itu, wajibah anak itu menyusukan anaknya.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Syeh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 611

Dan Firman Allah SWT yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ لِي بَعْدَ عَمَلِي كَمَا كُنْتَ عَمَلًا لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِ حَقٌّ يَوْمَئِذٍ  
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنْهُ لِي بَعْدَ عَمَلِي كَمَا كُنْتَ عَمَلًا لَّيْسَ لَكَ عَلَيْهِ حَقٌّ يَوْمَئِذٍ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(Q.S Al-Qashas : 26)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِمَا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ تُبَدِّلَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  
فَإِنْ أَنْتُمْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ  
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”. (Q.S Al-Qashas: 27)

Ayat di atas menjelaskan salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai Ayah, pekerjaan pemuda itu untuk menggembala atau mengurus domba piaraan kita dengan gaji Sungguh, ia adalah orang yang paling baik yang engkau pekerjaan, karena tenaganya kuat dan dirinya dapat dipercaya."

Syu'aib berkata kepada Musa, “aku akan bermaksud mengawinkanmu dengan salah seorang putriku ini. Sebagai mas kawinnya, kamu harus bekerja pada kami selama delapan tahun. Tapi, jika kamu mau menggenapkannya mejadi sepuluh tahun dengan sukarela, maka itu baik saja. Tapi aku tidak mengharuskan dirimu memilih masa yang lebih panjang. InsyaAllah kamu akan

mendapatkan diriku sebagai orang yang saleh yang baik dalam bermuamalat dan menepati janji.”<sup>65</sup>

Berdasarkan ayat-ayat yang telah disebutkan, maka upah dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu aspek dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi).

## 2) Hadis

Adapun dasar hukum upah mengupah adalah sebagai berikut:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ  
وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه أحمد والبخاري ومسلم)

“Ibnu Abbas ra. “Rasulullah SAW berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya seandainya berbekam itu haram tidaklah beliau memberi upah”<sup>66</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه و الطبراني)

“Dari Abdulah bin Umar ra ia berkata Rasulullah SAW bersabda:  
Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.  
(HR. Ibnu Majah Dan At-Thabrani)”<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ahmad Muastofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1993), h. 84

<sup>66</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam”Syarah Bulughul Maram”*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 153.

### 3) Ijma'

Dasar hukum Upah Mengupah (*ijarah*) dalam *Al-Ijma'* adalah sebagai berikut: “Umat Islam pada masa sahabat telah beijma' bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dari Said Ibn Bi Waqash) <sup>68</sup> Karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa, melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. <sup>69</sup>

#### c. Rukun Dan Syarat Upah (*Ijarah*)

Transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah dapat menjadi sah harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan Kabul dengan lafaz *ijarahi* atau *isti'jar*. Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqidan* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*
- 2) *Ma'qud 'alaih* yang terdiri dari *ujrah* dan manfaatnya,
- 3) *Sighat* yang terdiri dari *ijab* dan *kaibil*.

Adapun syarat-syarat *akad ijarah* adalah sebagai berikut:

#### 1) Syarat Terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*)

- a) Syarat untuk pelaku yang berakad (*al-muta'qidain*). Pelaku akad diharuskan telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'iyah dan Hanabiah). Dengan demikian, apabila orang yang belum atau tidak

<sup>67</sup> Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 490.

<sup>68</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 124.

<sup>69</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Nor Hasanuddin dari “*Fiqhus Sunnah*” Jilid IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 18.



berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka (sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *al-ijarah*-nya tidak sah.

Berbeda dengan Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan, bahwa kedua orang yang berakad boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya, ini berarti para pihak yang melakukan akad *ijarah* harus sudah cakap hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum *mumayyiz*, dan tidak berakal.<sup>70</sup>

b) *'An-taradin*, artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah mengupah atau sewa menyewa karena paksaan oleh salah satu pihak ataupun dari pihak lain.<sup>71</sup> Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

<sup>70</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

<sup>71</sup>Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah...*, h. 132.

dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa’ (4): 29)

## 2) Syarat Sahnya Akad (syarat *ash-shihhah*)

- a) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu. Maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa’ (4): 29.
- b) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.<sup>72</sup> Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena *ijarah*, seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.<sup>73</sup>
- c) Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh

<sup>72</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 232.

<sup>73</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 186.

penyewa. Atau dengan kata lain tidak sedang digunakan atau disewakan dengan orang lain.<sup>74</sup>

d) Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, objek sewa menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.<sup>75</sup>

e) Sesuatu yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Maka bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin.<sup>76</sup> Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

f) Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tungangan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan

<sup>74</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 233.

<sup>75</sup>*Ibid*, h. 231-233.

<sup>76</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.

dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.<sup>77</sup>

### 3) Syarat-Syarat Upah (*ujrah*)

- a) Upah/sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa *khamar* dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
- b) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (*ma'qud 'alaih*). Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *ijarah* seperti ini dibolehkan.<sup>78</sup>

### d. Macam-Macam Upah (*Ijarah*)

Ada dua jenis *ijarah* dalam Islam, yaitu:

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah dibayarkan disebut *ujrah*.<sup>79</sup> Syarat-syarat *ijarah* yang bersifat sewa jasa.
  - a) Menyebutkan kriteria jasa yang disewakan secara spesifik
  - b) *Ujrah* harus diserahkan secara cash di majelis *akad*.<sup>80</sup>

<sup>77</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 234.

<sup>78</sup>*Ibid*, h. 231-235.

<sup>79</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 99.

<sup>80</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-II, (Kediri: Lirnoyo Press, 2013), h. 289.

- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>81</sup> *Ijarah* yang bersifat sewa aset atau properti umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.<sup>82</sup>

Syarat-syarat *ijarah* yang bersifat sewa aset atau properti

- a) Objek yang disewakan ditentukan secara spesifik, seperti menyewa barang yang disewakan.
- b) Objek yang disewakan harus ada dalam majlis akad dan disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak yang berakad pada saat akad *ijarah* dilaksanakan. Karena itu, dalam *ijarah* yang bersifat manfaat suatu barang, tidak sah apabila objek akad tidak dalam suatu majlis akad, kecuali objek akad pernah disaksikan sebelumnya secara langsung hingga akad *ijarah* dilaksanakan.<sup>83</sup>

#### e. Objek Upah Mengupah (*Ijarah*)

Ketentuan Objek upah mengupah adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Objek *ijarah* adalah manfaat barang dan/atau jasa.

<sup>81</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 h. 99.

<sup>82</sup> *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 241.

<sup>83</sup>Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Kediri: Lirnoyo Press, 2013.h. 287.

<sup>84</sup>Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembayaran *Ijarah*.

- 2) Manfaat barang atau jasa bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- 8) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

**f. Hal-Hal yang Wajib Dilakukan oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir***

Hal-hal yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak pada proses *ijarah* baik pada pihak *mu'jir* atau orang yang menyewakan maupun *musta'jir* atau penyewa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan,

- mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.
- 2) Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewanya.
  - 3) Ijarah adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak, *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ijarah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan hukum jual beli. Dan, masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad kecuali dengan persetujuan pihak lain, kecuali jika ada kerusakan yang ketika akad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya. Maka hal ini boleh membatalkannya.
  - 4) Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menggunakannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.<sup>85</sup>
  - 5) Jika seorang yang disewa (diupah) jatuh sakit, maka digantikan orang lain, sedangkan bayarannya adalah dari orang yang jatuh sakit tersebut. Kecuali jika telah disepakati bahwa ia harus melakukan sendiri pekerjaan tersebut, maka tidak bisa digantikan. Karena terkadang tujuan dari akad *ijarah* tersebut tidak bisa terwujud jika dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>85</sup> Shaleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari, Ter Abdul Hayyie Al-Kattani* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485



- 6) Upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad, orang yang disewa tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah (disewa) dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Jika yang disewa adalah benda, maka pemiliknya boleh meminta bayaran setelah penyewa mengambil manfaat yang dibutuhkan atau setelah menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan selesai masa sewa dengan tanpa adanya penghalang.
- 7) Orang yang disewa diwajibkan bekerja bersungguh-sungguh dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Haram baginya menipu dan berkhianat dalam melakukan pekerjaannya. Selama disewa, ia wajib terus bekerja dan tidak melewatkan sedikitpun waktu dari masa penyewaan tersebut tanpa bekerja. Dan, hendaknya ia bertaqwa kepada Allah dalam melaksanakan kewajibannya tersebut.<sup>86</sup>

**g. Berakhirnya Upah Mengupah (*Ijarah*)**

Pada dasarnya perjanjian *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (aqid) meninggal dunia, perjanjian *ijarah* tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, h. 483.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian *ijarah* yang tidak menyebabkan putusya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan/dasar yang kuat.<sup>87</sup> Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah (*Ijarah*) dalah disebabkan hal-hal:<sup>88</sup>

1) Terjadinya Aib Pada Barang Sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

2) Rusaknya Barang Yang Diupahkan (*Ma'jur 'Alaih*),

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

3) Terpenuhinya Manfaat Yang Diakadkan, Dan

---

<sup>87</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 160.

<sup>88</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 57-58.

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa menyewanya telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

#### 4) Penganut Mazhab Hanafi Menambahkannya Dengan *Uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan *uzur* di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

### **B. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang ada kemiripan objek atau permasalahan, yang sangat boleh jadi ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut dapat berupa laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis atau disertasi.<sup>89</sup> Tinjauan pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

---

<sup>89</sup>Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, (06 November 2019 Pukul 23:05)

1. Penelitian Kusnul Ciptanila Yuni K (2019) Yang Berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Bahwa dalam akad pembayaran upah air di Desa Bibrik sejalan dengan akad *ijarah*, pada paraktiknya unsur dalam akad ini sudah memenuhi syarat dan rukun akad *ijarah*, di lihat dari percakapan ijab kabul petani terlihat mengucapkan seperti akad jual beli bukan sebagai akad *ijarah* dan adanya upah yang tidak dipastikan oleh kelompok tukang air tetapi ini dilakukan agar lebih luwes namun tetap dalam maknanya yaitu akad *ijarah*. 2) Kelompok tukang air melakukan akad ini menerima upah dari petani sudah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*, masalah mursalah, dan *ujroh*, karena kelompok tukang air berkad dengan jasanya bukan untuk menjual air, selain itu permintaan upah tambahan memperhatikan tenaga besar yang dikeluarkan untuk sekali pengairan air sawah.<sup>90</sup>
2. Penelitian Novi Setyowati (2013), yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengairan Sawah Di Susun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh bersumber dari para pelaku

---

<sup>90</sup>Kusnul Ciptanila Yuni K, Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

kerjasama bagi hasil dan masyarakat Dusun Sindet yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut, berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil dalam sistem pengairan sawah di Dusun Sindet sudah sesuai dengan hukum Islam, kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musaqah*, namun ada sedikit perbedaan dimana dalam syarat *musaqah* lahan diberikan pada penggarap sedangkan yang ada di Dusun Sindet petani tidak memberikan tanahnya mereka menggarap sendiri lahannya. Akad *musaqah* ini tidak akan rusak karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan prosentase bagi hasilnya sudah jelas dan sesuai dengan hukum Islam.<sup>91</sup>

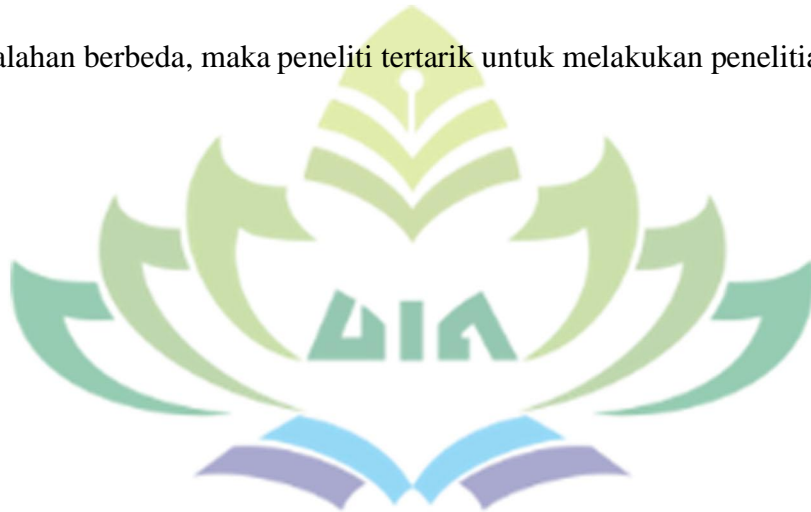
3. Penelitian yang berhasil ditemukan adalah penelitian Richo Setyonugroho (2016) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh dari praktek irigasi sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sedangkan metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa tinjauan hukum fiqh sistem *ijarah* pada irigasi sawah yang terjadi di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sudah memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun *ijarah*, hanya proses terjadinya akad dilakukan pengucapan seperti akad jual beli bukan akad *ijarah*, sedangkan sistem akad *ijarahnya* dalam

---

<sup>91</sup> Novi Setyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengairan Sawah Di Susun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

melakukan akad irigasi petugas menerima upah dari petani telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah*.<sup>92</sup>

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Sistem Upah *Ili-Ili* terhadap Pengaliran Sawah Perspektif Hukum Islam Studi Desa Saptomulo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yang berfokus pada permintaan pembayaran upah secara penuh namun tidak diimbangi dengan pekerjaan sebagaimana yang telah dijanjikan sebelumnya pada awal akad. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian yang dilakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian berbeda serta fokus permasalahan berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.



---

<sup>92</sup> Richo Setyonugroho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2016.

## DAFTAR PUSTAKA

### Hadis

Al-Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2015.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam "Syarah Bulughul Maram"*, Jilid III, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.

### Buku

Abdurrahman, Syaik Bin Nashir, *Tafsir Al-Quran*, Jakarta: Darus Haq, 2016.

Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari, Ter Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Maragi, Ahmad Muastofa, *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.

Al-Munawar, Said Agi Husin, *Hukum Islam & Pluritas Sosial*. Jakarta: Peadani, 2005.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosdur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis*. Jakarta: RinekaCipta, 1998.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Burhanudin, Nandang, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam*, Bandung: Media Fitrah Rabbani dan YPM Darussalam Kutai, 2010.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-III, Jakarta: Kencana, 2007.

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembayaran *Ijarah*.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan Binjai, Syeh H. Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Jalaluddin, Al-Imam, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman, *Tafsir Jalalain*, Cet II. Surabaya: Elba Fitrah Mndiri Sejahtera, 2015.

K. Lubis, Suhrawardi dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.



- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Monografi Profil Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, 2020.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Persada, 2008.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Peraturan Pemerintah RI No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 1.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid, Cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Rahman, Al-Faruz, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1989.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Dyariah "Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan. Nor Hasanuddin dari "*Fiqhus Sunnah*" Jilid IV, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Bandung: Alma'arif, 1987.
- Soekanto, Soejarno, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS, 2002.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, suatu Tinjauan*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet Ke-21 Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Bayumedia Pubhlishing, 2005.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Tika ,Moh. Pabuda, *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah (Diskursus Metodelogi Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi)*, Cet-II, Kediri: Lirnoyo Press, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 2, Cet- 3, Jakarta: Balai Pustaka 1994.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

### **Jurnal**

- Adur Rohman, Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (Mlm), *Al-Adalah* Vol. 13, No. 3, 2016.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin, Bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Persepektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia, *Al-Adalah*, Vol XII, No. 4, 2015.
- Muzakki, M. Harir & Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Al-Adalah* Vol. 14, No. 2, 2017.

### **Sumber Online**

- Kusnul Ciptanila Yuni K, Analisis Hukum Islam Terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabpaten Madiun, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Novi Setyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah Di Susun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Odon1wirawan, tersedia di: <https://brainly.co.id/tugas/270311>, 06 November 2019 Pukul 23;05.
- Richo Setyonugroho, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2016.

### **Wawancara**

- Bapak Anwar, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 06 Oktober 2020.
- Bapak Dalijan, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 11 Oktober 2020.

Bapak Hadi, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 03 Oktober 2020.

Bapak Joyo, Petugas *Ili-Ili*, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 01 Oktober 2020.

Bapak Jumar, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 06 Oktober 2020.

Bapak Marsum, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 05 Oktober 2020.

Bapak Ngadiran, Petugas *Ili-Ili*, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 01 Oktober 2020.

Bapak Rasan, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 13 Oktober 2020.

Bapak Sarono, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 09 Oktober 2020.

Bapak Sugiman, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 12 Oktober 2020.

Bapak Suwito, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 03 Oktober 2020.

Bapak Tadi, Petani, **Wawancara**, Di Desa Saptomulyo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah , 05 Oktober 2020.

